

**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.1377/PID/B/2008/PNPLg
Dalam Perkara Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Penyewaan
Suku Cadang di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)**

**Diajukan Sebagai Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian
Hukum dan Sistem Peradilan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Oleh :

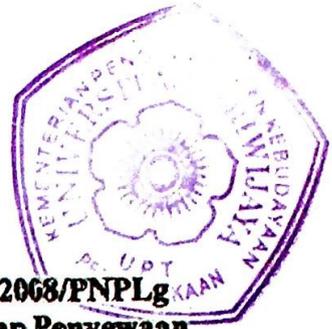
**RIA OKTARINA RIDWAN
52081001167**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
2013**

S
345.0507

Ria
a
2013

Record : 21590
Reg : 22054



**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.1377/PID/B/2008/PNPLg
Dalam Perkara Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Penyewaan
Suku Cadang di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang
(Study Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)**

**Diajukan Sebagai Pernyataan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Bagian
Hukum dan Sistem Peradilan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Oleh :

**RIA OKTARINA RIDWAN
52081001167**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS PALEMBANG
2013**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN SKRIPSI

**SECARA SUBSTANSI TELAH DISETUJUI DAN DIPERTAHANKAN DALAM
UJIAN KOMPREHENSIF**

Nama : Ria Oktarina Ridwan

NIM : 52081001167

Program Studi : Ilmu Hukum

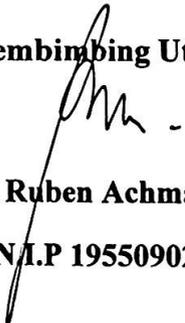
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem peradilan Pidana

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
HAKIM No. 1377/PID/B/2008/PNPLg dalam Perkara Pidana
Penggelapan Jabatan dalam Penyewaan Suku Cadang di PT United
Tractors Tbk Cabang Palembang (Study Kasus di Pengadilan Negeri
Kelas IA Palembang)

Palembang, 27 Maret 2013

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama


H. Ruben Achmad, S.H., MH.

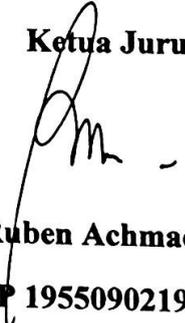
N.I.P 195509021981091001

Pembimbing Pembantu


Henny Yuningsih, S.H., M.H

N.I.P. 19831242009122001

Ketua Jurusan


H. Ruben Achmad, S.H., M.H

N.I.P 195509021981091001

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ria Oktarina Ridwan
NIM : 52081001167
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem peradilan Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
HAKIM No. 1377/PID/B/2008/PNPLg dalam Perkara Pidana
Penggelapan Jabatan dalam Penyewaan Suku Cadang di PT United
Tractors Tbk Cabang Palembang (Study Kasus di Pengadilan Negeri
Kelas IA Palembang)

Menyatakan bahwa laporan tugas akhir saya merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil penjiplakan / *plagiat*. Apabila ditemukan unsur penjiplakan / *plagiat* dalam laporan tugas akhir ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari universitas Sriwijaya.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.



Palembang, 27 Maret 2013



[Ria Oktarina Ridwan]

Motto :

Kebenaran itu datang dari Allah SWT, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang yang ragu (Al- Baqarah : 147)

Junjunglah martabat seorang Ibu diatas Kepala Laksana Sebuah Mahkota karena dengan doa dan restunya apa-apa yang dicita-citakan mudah tercapai.

Kupersembahkan Kepada :

Papa dan Mama Tercinta

Saudara-saudaraku yang terkasih

My Embrace&My Little Child Tersayang(Faqih)

Para Pendidikku yang terhormat

Keponakanku tercinta (Qaqa&Qiqi)

Sahabat-sabatku

ABSTRAK

Skripsi ini Berjudul, “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No. 1377/PID/B/2008/PNPIg Dalam Perkara Pidana Penggelapan Jabatan Dalam Penyewaan Suku Cadang Di PT. United Tractors Tbk Cabang Palembang (Study Kasus Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat normatif yaitu metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang. Dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang. Teknik pengumpulan bahan dilakukan dengan melakukan wawancara kepada hakim yang memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT United Tractor Tbk Cabang Palembang dan melakukan wawancara kepada Kepala Lembaga Perasyarakatan Palembang. Analisis bahan diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan menggunakan cara deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang merupakan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan mendasar pada alasan-alasan yang diatur didalam KUHP, KUHAP, dan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam memutus suatu perkara yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang adalah dengan telah terbukti dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT United Tractor Tbk Cabang Palembang dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang terhadap terdakwa yang berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, maka hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa tahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana penggelapan, Penerapan Pidana, dan penyewaan Suku Cadang.

Ucapan Terima Kasih

Bismillahirrahmanirrahim

Assalaamu 'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Pertama-tama penulis mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayanya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.1377/PID/B/2008/PNPLg Dalam Perkara Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Penyewaan Suku Cadang di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang (Study Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)” untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah berusaha dengan segala kemampuan yang penulis miliki, namun penulis menyadari masih banyak kekurangan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini, tapi inilah hasil maksimal yang ada pada penulis pada saat ini. Oleh karenanya penulis sangat mengharapkan sekali saran dan petunjuk yang sifatnya membangun guna kesempurnaan penulisan-penulisan yang akan mendatang

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian studi dan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik dari fakultas maupun dari keluarga

dan teman-teman seperjuangan maka saya sampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan setulus hati kepada :

1. Allah SWT, karena berkat rahmat, ridoh dan hidayanya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada ayahanda dan Ibunda tercinta yang tiada hentih-hentinya selalu memberikan ku motivasi, dukungan, nasehat dan doa.
3. Bapak Prof.Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar-asyidi, S.H.,M.S,selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Meria Utama, S.H.LL.M, selaku pembantu dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H. M.H, selaku pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Sriwijaya.
8. Bapak H. Ruben Achmad, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama yang tiada henti-hentinya meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
9. Ibu Henny Yuningsih, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang juga tiada henti-hentinya meluangkan waktu tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Bapak Arta Febrina, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing KKL ku yang selalu memberi sport dan motivasi dan yang juga tiada henti-hentinya mengingatkan dan meluangkan waktu juga pikiran untuk membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak Antonius Suhadi A.R ,S.H.,M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik yang selama 4 tahun 8 bulan membimbing panulis dalam studi pengambilam mata kulia.
12. Staf dan dosen pengajar yang selama massa studi tiada henti-hentinya memberikan ilmu kepada penulis
13. Staf dan karyawan ibu ita, yuk cali, yuk dwi, yuk cica, yuk meta dan kak andre yang telah banyak membantu dan memberikan informasi dalam hal akademik.
14. Pihak PENGADILAN NEGERI KELAS IA PALEMBANG yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
15. Pihak LEMBAGA PEMASYRAKATAN PAKJO KOTA PALEMBANG yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
16. Kedua saudari saya ayunda tersayang Andian Ridwan, S.T., dan adinda tersayang Alrisa Ridwan, S.E., dan juga Rara, Qanita, dan Aqram, Angga Keponakan tercinta yang selalu mendoakan,menghibur dan menemani saya baik suka maupun duka.

17. My Embrace ku Lody Yansah terima kasih selalu mendoakan, menghibur, mengingatkan, memberikan sport, motivasi, dan selalu menemani dalam suka dan duka kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
18. My best friends Linda, Anggi, Shinta, Raka, Enal, yang selalu mengingatkan dan memberikan sport kepada penulis dan teman kampus semua angkatan 2008.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstract.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian	9
1. Tipe Penelitian	9
2. Metode Pendekatan Masalah	9
3. Sumber Bahan Penelitian	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
5. Analisis Bahan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	14

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	23
4. Pidana dan Pemidanaan.....	32

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan.....	41
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penggelapan dan Unsur-Unsurnya.....	48

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim.....	56
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	59

BAB III PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Penyewaan Suku Cadang di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang.....	68
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Penyewaan Suku Cadang di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang.....	91

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....98
B. SARAN.....100

Daftar Pustaka101

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan yang ada pada masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut, baik bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi maupun hukum. Di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain, yakni pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat¹.

Kehidupan masyarakat yang dengan cepat mengalami perkembangan dan pembaharuan, sehingga tingkat kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah khususnya dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Peningkatan jumlah sumber daya masyarakat yang semakin bertambah dan perkembangan teknologi yang semakin berkembang sehingga peran serta pihak swasta semakin dibutuhkan untuk menunjang tingkat perkembangan yang ada pada masyarakat. Semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan. Sehingga

¹ Iman sudiyat, *Pengantar Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1991, Hlm 29

menjadikan keadaan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Sehingga dengan peningkatan sumber daya manusia dapat diimbangi dengan adanya pihak swasta yang dapat membantu masyarakat dalam perkembangan di kehidupannya. Selain itu juga dengan adanya peran pihak swasta yang semakin mengalami perkembangan untuk membantu pembangunan dalam kehidupan masyarakat adanya pihak swasta juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan adalah dibidang perdagangan terhadap penjualan dan penyewaan suku cadang alat berat.²

Alat berat merupakan salah satu alat yang dipergunakan untuk pembangunan, karena merupakan bagian dari alat industri. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan alat berat, salah satunya adalah PT United Tractors Tbk. Keberadaan alat berat sebagai alat produksi, perlu didukung oleh ketersediaan suku cadangnya.³

Peningkatan kualitas dan kuantitas terhadap penjualan suku cadang tersebut nampaknya belum seimbang dengan daya beli masyarakat. Masyarakat masih banyak mempunyai kemampuan terbatas, untuk memperoleh barang-barang hasil produksi tersebut. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan dan beberapa distributor alat berat, yang pada dasarnya menciptakan lebih banyak variasi sistem pemasaran barang yang telah ada. Semua

² Iman Sudiyat, *Ibid*, hlm.31.

³ Usahasuksesmandiri.iournalspot.com/2011/10/profil_sejarah_pt_united_tractor_tbk.Html. Diakses pada tanggal 13 Januari 2013.

ini sebagai akibat dari perkembangan kehidupan perekonomian pada umumnya dan industri pada khususnya.⁴

Pihak penjual menghadapi banyak permasalahan dari pelanggan terhadap permintaan barang hasil produksi tersebut, salah satunya seperti suku cadang *Bulldozer, Excavator, Dump Truck, Wheel Loader, Motor Grader, Forklift, Genset* dan *ban*. Namun masih banyak pelanggan yang sangat sulit untuk mendapatkan suku cadang tersebut, karena harus menunggu lama dikirimkan dari perusahaan pusat. Sementara itu pihak perusahaan juga menghadapi kendala dan menyadari untuk memasarkan barangnya dalam jumlah yang besar adalah sulit.⁵

Sebagai jalan keluarnya maka perusahaan pusat membuka anak cabang di setiap wilayah untuk meningkatkan pemasaran hasil produksinya. Barang-barang hasil produksi dikirimkan ke anak cabang yang dipasarkan oleh karyawannya. Para karyawan tersebut diberi kepercayaan dan wewenang yang penuh oleh perusahaan untuk menjual ataupun menyewakan barang-barang hasil produksi perusahaan.⁶

Mekanisme sistem pembayaran dalam penjualan dan penyewaan suku cadang di PT United Tractors bisa dilakukan dengan pembayaan secara kontan maupun kredit yang prosesnya diserahkan oleh perusahaan kepada karyawan di bidang pemasaran untuk memberikan penjelasan dalam proses pembayaran suku cadang yang akan dijual ataupun disewakan kepada konsumen, dengan melakukan

⁴ www.Sirjaya.com/Arts/ekonomi_pidana.com diakses pada tanggal 13 Januari 2013.

⁵ Sumber dari Nurcholislm.file.wordpress.com/mengenal_jenis_alat_berat.html. Diakses pada tanggal 13 Januari 2013.

⁶ Sumber dari www.bapepam.go.id/p3/publikasi_p3/kinerja_ventura.html. Diakses pada tanggal 13 Januari 2013.

pembayaran melalui karyawan yang memasarkan barang-barang perusahaan. Setelah barang-barang perusahaan terjual ataupun disewakan kepada masyarakat ataupun instansi, perusahaan atau lembaga yang memerlukan barang-barang hasil produksi perusahaan, maka karyawannya harus menyetorkan hasil penjualan atau penyewaan barang-barang perusahaan ke staf administrasi perusahaan yang kemudian staf administrasi akan menyetorkan ke rekening perusahaan atau ke pemegang saham perusahaan tersebut. Namun tidak semua karyawan yang diangkat dan diberi kepercayaan juga wewenang oleh pihak perusahaan untuk menjual atau menyewakan barang-barang hasil produksi perusahaan beritikad baik dalam memasarkan hasil produksinya.⁷

Sebagai contoh dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh karyawan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang yang tidak menyetorkan sebagian dana hasil penjualannya atau penyewaan barang-barang hasil produksi perusahaan ke rekening perusahaan. Dana tersebut dipergunakan untuk kepentingannya pribadi, sehingga merugikan pihak perusahaan. Contohnya seperti kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh karyawan PT United Tractors Tbk Cabang Palembang. Berdasarkan putusan nomor: 1377/PID/B/2008/PNPLg, atas nama terdakwa Edwin Chandra Putra, S.E. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hukuman yang diberikan kepada terdakwa jauh lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan di dalam persidangan, menuntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Primair

⁷ Sumber dari www.mekanisme_sistem_pembayaran_pt_united_tractors_tbk.html. Diakses pada tanggal 24 Januari 2013.

Pasal 374 jo 64 KUHP atau Subsidiar Pasal 372 jo 64 KUHP. Apabila karyawan telah melakukan suatu tindak pidana penggelapan terhadap suatu perusahaan maka, dapat dituntut melakukan penggelapan dalam jabatan.⁸

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelakunya dapat diancam dengan hukuman pidana, yang diatur dalam Pasal 372, 373, 374, 375, serta Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374 KUHP, dinyatakan penggelapan:¹⁰ *“penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasanya terhadap barang yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana pidana paling lama lima tahun penjara.”*

Di dalam Pasal 374 KUHP yang termasuk unsur-unsurnya yaitu ¹⁰:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan.
3. Yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena hubungan kerja dalam mata pencarian atau profesinya memperoleh upah atau uang.

⁸ Sumber dari Putusan nomor: 1377/PID/B/2008/PNPLg.

⁹ Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang di atur dalam pasal 372,373,374,375,dan 376 yang mengatur tentang pidana penggelapan.

¹⁰Lihat Kitab Undang-undang Hukum Pidana penjelasan pasal 374.



Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana penggelapan merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai pemilik sendiri suatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya, yang diperoleh bukan karena kejahatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengambil Judul Skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.1377/PID/B/2008/PNPLg Dalam Perkara Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Penyewaan Suku Cadang di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang (Study Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam penyewaan suku cadang di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam penyewaan suku cadang di PT United Tractors Tbk cabang Palembang?

2. Ruang Lingkup

Agar pembahasan tidak terlalu luas maka ruang lingkup dalam skripsi ini hanya membahas tentang dasar hukum hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana pada tindak pidana penggelapan jabatan dan penerapan sanksi pidana pada tindak pidana penggelapan jabatan.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan penelitian di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggelapan jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh yakni berupa manfaat baik kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis, sebagai sumbangan pemikiran terhadap bidang ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengembangan ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Kegunaan Praktis, sebagai masukan kepada aparat penegak hukum, seperti: polisi, jaksa, hakim, perusahaan swasta khususnya perusahaan di bidang penjualan alat berat dan masyarakat tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam upaya menanggulangi tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian hukum normatif yang digunakan oleh penulis. Metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya.¹¹

Penelitian ini juga menggunakan taraf sinkronisasi hukum horizontal, yaitu sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang ada serasi satu sama lainnya dilihat dari sudut horizontal, peraturan Perundang-undangan yang ada dengan peraturan yang lainnya.¹² Penelitian ini menghubungkan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yaitu hukum yang terdapat dalam dalam

¹¹ Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 105.

¹² Bambang Sugono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta, Hlm 94.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Metode Pendekatan Masalah

Penelitian hukum menggunakan beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan kepada pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dimana disesuaikan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi penulis, yaitu :

a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*).

Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

b) Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang : pembiayaan *murabahah*, akad (perjanjian). Dengan didapatkan konsep yang jelas maka diharapkan penormaan dalam aturan hukum kedepan tidak lagi terjadi pemahaman yang kabur dan ambigu.

c) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

¹³ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 105.

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian emperis bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di lapangan. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian jelas kasus-kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian emperis, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.¹⁴

3. Sumber Data Penelitian

Adapun yang menjadi data di dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Data primer bersumber dari kegiatan penelitian lapangan yang berlokasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang. Lokasi tersebut diambil dengan alasan dan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang pernah memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT United Tractors Tbk. Cabang Palembang. Data di dapat dengan mengadakan wawancara terstruktur kepada Hakim yang pernah memutus perkara tindak pidana penggelapan dalam

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Emperis*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, Hlm 268.

jabatan di PT United Tractors Tbk. Cabang Palembang dan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pakjo Kota Palembang.¹⁵

b. Data sekunder

Data sekunder di dapat dari study pustaka. Study pustaka yang dilakukan berupa penelusuran bahan hukum :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan Perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Putusan Hakim Nomor 1377/PID/B/2008/PNPIg.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.

¹⁵ Zainudin Ali, *Op.cit*, Hlm 176.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dan penjelasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Dalam hal ini wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Adapun teknik pengumpulan bahan di lapangan dilakukan dengan metode wawancara terstruktur adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah hakim yang memutus perkara dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang yang terdiri dari hakim ketua dan dua orang hakim anggota. Wawancara mendalam dilakukan terhadap hakim yang pernah memutus perkara tindak pidana penggelapan jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang dan wawancara kepada Kepala Lembaga Pemasarakatan Palembang untuk menjawab permasalahan mengenai penerapan sanksi pada tindak pidana penggelapan jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang.

5. Analisis Data Penelitian

Data dan informasi penunjang yang diperoleh, dikumpulkan dan dianalisis melalui metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan membahas permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Bahan hukum dan informasi yang diperoleh sebagai penunjang skripsi ini, dikumpulkan, dan dianalisis secara deskriptif yaitu dengan dihubungkan secara sistematis untuk memperoleh hasil analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan menggunakan cara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang merupakan pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.¹⁷ Hasil analisis bahan-bahan hukum dan informasi penunjang secara deskriptif analisis merupakan proposisi umum secara deduktif dihubungkan dengan permasalahan untuk kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

¹⁶ Zainudin Ali, *Op.Cit*, Hlm 106.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, Hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari Buku-Buku :

Adami Chazawi, 2002, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amaturrahman, 2008, *Diktat Hukum Acara Perdata*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Bambang Poernomo, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Chairul Huda, 2008, *Tindak-tindak Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, 2002, *Putusan Pengadilan Negeri dan perumusan Memori Kasasi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Iman Sudiyat, 1991, *Pengantar Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Laden Marpaung, 1998, *Pertanggungjawaban Pidana Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.

Laden Marpaung, 2009, *Asas-Teori-Praktik hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1996. *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

M. Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

- M. Rasyid Ariman, Syarifudin Pettanase dan Fahmi Ragib, 2007, *Kebijakan Kriminal*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Muladi, 2005, *Penerapan Pemidanaan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, 2008, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasrianah, 2010, *Diktat Hukum Penintesis*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- P.F.A. Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rusli Efendi, 1996, *Kejahatan Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.
- Skripsi Andian Eka Kusuma, 2010, *Tindak Pidana Penggelapan Jabatan Dalam Kasus Aplikasi Kartu Kredit*, Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Skripsi Herwastoeti, 2010, *Pengaturan Sistem Pidana dan Pemidanaan di Lembaga Masyarakat Palembang*, Universitas Muhammadiyah, Palembang.
- Skripsi Ilmi Akbar, 2010, *Analisis Kasus Tindak Pidana penggelpan dalam menggunakan rekening Bank*, Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Skripsi Ivanius Tuba Neto, 2010, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Kasus Grafikasi*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Skripsi Poernomo Putra, 2008, *Analisis Tindak Pidana Penggelapan di badan Perpajakan Nasional*, Universitas Muhammadiyah, Palembang.

Skripsi Putri Sandra, 2009, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan di Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Skripsi Vicencia, 2010, *Penerapan Pasal 372 KUHP Terhadap Penggelapan Kendaraan bermotor*, Universitas Sriwijaya, Palembang.

Soenarto Soerodibroto, 1994, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Road*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Subekti, 1997, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sumber dari Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang no. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan dan Kehakiman.

Sumber Internet :

Duduk Perkara Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang Kasus penggelapan dalam Jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang.

Pasal 12 KUHAP

Pasal 183 KUHAP

Pasal 193 ayat (1) KUHAP

Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP

Perimbangan Jaksa dan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang dalam
Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Terdakwa dalam perkara Penggelapan
Jabatan di PT United Tractors Tbk Cabang Palembang.

Putusan Nomor: 1377/PID/B/2008/PNPLg.

[Jurnal.kesmasmadi.blogspot.com/2011/10/profil_sejarah_pt_united_tractor_tbk.html](http://jurnal.kesmasmadi.blogspot.com/2011/10/profil_sejarah_pt_united_tractor_tbk.html)

Nurcholism.file.wordpress.com/.../menenal_jenis_alat_berat.html.

Wawancara dengan Achmad Burhan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pakjo
Palembang.

Wawancara dengan Zahri Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang.

www.achmadfirdaus.com

www.bapepam.go.id/p3/publikasi_p3/kinerja_ventura.html

www.hukumonline.com